

Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata (Study Kasus Objek Wisata Kapalo Banda Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota)

¹Doni Ikhlas, ²Asdi Agustar, ³Ifdal
^{1,2,3}Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Korespondensi : Donei_01@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang peran masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Kapalo Banda di Nagari Taram Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian ini dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah yaitu apa yang dilakukan masyarakat lokal terhadap Objek Wisata Kapalo Banda sehingga menjadi daya Tarik bagi wisatawan dan dengan berkembangnya objek wisata kapalo banda, manfaat apa yang di dapatkan oleh masyarakat lokal. Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang diperankan masyarakat lokal dalam menunjang perkembangan destinasi wisata Kapalo Banda dan Mendapatkan informasi tentang manfaat yang diperoleh masyarakat lokal dengan berkembangnya objek wisata Kapalo Banda. Penelitian ini merupakan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima peran masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata a) sebagai Pemrakarsa b) sebagai Pelaksana c) sebagai Penyerta d) sebagai penjau/pengawas e) sebagai Penerima manfaat dan suatu daya tarik wisata akan berkembang jika masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan prosesnya. Masyarakat harus berperan dalam pengembangan obyek wisata dimana tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam mengembangkan obyek wisata di desa wisata.

Kata kunci: Peran , Pengembangan , Desa Wisata , Kapalo Banda

Abstract

This study discusses the role of the community in developing the Kapalo Banda tourist attraction in Nagari Taram, Fifty Cities District. The results of this study are described in several formulations of the problem, namely what local people do to the Kapalo Banda Tourism Object so that it becomes an attraction for tourists and with the development of the Kapalo Banda tourism object, what benefits do the local community get. Based on the existing problems, this study aims to describe what the local community plays in supporting the development of the Kapalo Banda tourist destination and obtain information about the benefits obtained by the local community with the development of the Kapalo Banda tourist attraction. This research is a research conducted using a combined quantitative and qualitative approach. While the research method used is a case study method using observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are five roles of the community in managing tourist destinations a) as Initiators b) as Executors c) as Participants d) as observers/supervisors e) as Beneficiaries and a tourist attraction will develop if the community is involved in the whole process. The community must play a role in developing tourism objects where the goal of increasing community welfare is a priority in developing tourism objects in tourist villages.

Keyword: Role, Development, Tourism Village, Kapalo Banda

1. PENDAHULUAN

Destinasi pariwisata merupakan lokasi produksi, konsumsi dan pola-pola pergerakan wisata (Davidson dan Maitland, 1997). Selain itu destinasi pariwisata juga sebagai tempat hidup masyarakat untuk bekerja serta melakukan kegiatan sosial dan budaya. Hal tersebut juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menyatakan bahwa destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya.

Konsep pariwisata berbasis masyarakat berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi masyarakat. Natori (2001) mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat sebagai aktivitas masyarakat setempat untuk mempromosikan pertukaran dan untuk menciptakan sebuah komunitas yang penuh dengan energi oleh alam sepenuhnya, pemanfaatan budaya, sejarah, industri, orang-orang yang berbakat dan sumber daya lokal lainnya. Masyarakat di dalam destinasi pariwisata yang kemudian disebut dengan masyarakat lokal mempunyai potensi berupa beragam aktivitas yang dapat dikreasikan menjadi produk pariwisata. Budaya lokal, tinggalan masyarakat, serta festival menyediakan keunikan dan sesuatu yang baru dari perspektif wisatawan.

Kabupaten Limapuluh Kota memiliki potensi daya tarik yang dapat menjadikan pariwisata sebagai program unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, seperti keindahan alam, kekayaan kultur dan budaya, kesejarahan dan aneka kuliner khasnya. Dalam kebijakan pembangunan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan konsep Nagari Wisata sebagai salah satu strategi yang digunakan agar perkembangan pariwisata berimplikasi positif terhadap perekonomian masyarakat sekaligus dapat memelihara lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui nagari wisata, pariwisata diharapkan bergerak dengan keberpihakannya kepada semangat, dimana pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan (*pro job, pro growth, dan pro poor*). Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) Mendiskripsikan apa yang diperankan masyarakat lokal dalam menunjang perkembangan destinasi wisata Kapalo Banda, (2) mendapatkan informasi tentang manfaat yang diperoleh masyarakat lokal dengan berkembangnya objek wisata kapalo banda Nagari Taram.

2. METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami alasan masyarakat lokal berperan atau tidak berperan serta pada berbagai program dan kegiatan kepariwisataan di Objek Wisata Kapalo Banda. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat (Judistira K. Garna, 1999, Lexy J. Moleong, 1989).

Kegiatan analisis data dilakukan mengikuti proses antara lain, reduksi data (sortir data), penyajian data, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya. Pengolahan data atau analisis deskriptif (*descriptive analysis*) mengandung pengertian sebagai usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui

langkah-langkah klasifikasi sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat. Alan Bryman (2002) menjelaskan bahwa triangulasi ialah logika pendekatan penyelidikan di mana temuan-temuan dari satu jenis kajian dapat dicek pada temuan-temuan yang diperoleh dari jenis kajian lain. Informasi ini ditafsirkan dan diolah menjadi kesimpulan. Interpretasi dibangun melalui kombinasi data, teori yang digunakan, dan sikap peneliti (*reasoning capacity*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Objek Wisata Kapalo Banda.

Peran masyarakat memiliki artian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mencerminkan kesamaan perilaku sebagai sebuah *entitas komunal* yang berkaitan dengan struktur sosial tertentu Saputra, T. dkk (2022). Dari pemahaman tersebut di atas, maka peran masyarakat memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Perilaku sekelompok orang, dimana tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh individu-individu yang ada dalam suatu kelompok.
- b. Adanya pembagian peran masing-masing anggota kelompok.
- c. Adanya kesamaan perilaku dari kelompok tersebut yang meliputi pola pikir dan pola tindak.
- d. Perilaku tersebut merupakan perwujudan dari ciri atau kehendak kelompok.
- e. Dilakukan dalam suatu struktur sosial tertentu.

Pemahaman peran masyarakat tersebut dalam konteks pengembangan objek wisata memiliki artian sebagai adanya kesamaan pola pikir maupun pola tindak dari masyarakat perdesaan mengenai potensi wisata yang ada di desanya, untuk kemudian masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan suatu tindakan dalam upayanya untuk mewujudkan tujuan pengembangan pariwisata sebagai sebuah dimensi yang mampu memberikan dampak positif bagi mereka, serta mampu mencerminkan identitas mereka sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki struktur sosial yang khas atau unik.

Pada penelitian ini peran masyarakat dikelompokkan menjadi 5 (lima) berdasarkan bentuk peran dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata kapalo banda sebagai berikut.

- (1) Peran masyarakat sebagai pemrakarsa
- (2) Kedua, peran masyarakat sebagai pelaksana
- (3) Peran masyarakat sebagai penyerta
- (4) Peran masyarakat sebagai peninjau/pengawas
- (5) Peran masyarakat sebagai penerima manfaat

Berbagai peran masyarakat tersebut pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung pengembangan pariwisata, namun dengan intensitas dan kepentingan yang berbeda-beda.

Tabel 1. Perbedaan Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata

Peran Masyarakat	Kontribusi	Tindakan Masyarakat	Tujuan Keterlibatan Masyarakat
Sebagai Pemrakarsa	Memberikan kontribusi baik sumbangan pemikiran, tenaga, dana hingga yang lainnya.	Terlibat aktif dalam pengembangan potensi wisata untuk dijadikan objek wisata.	Menggali potensi pariwisata yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata.

Sebagai Pelaksana	Memberikan kontribusi penuh baik sumbangan pemikiran, tenaga, dana hingga yang lainnya.	Terlibat aktif dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.	Mengembangkan potensi pariwisata yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata.
Sebagai Penyerta	Memberikan kontribusi secara terbatas yang didasarkan kepada peran yang diberikan.	Terlibat aktif dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.	Mengembangkan potensi pariwisata yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata.
Sebagai Pemantau	Memberikan kontribusi secara terbatas berupa kegiatan pemantauan.	Mendorong terlaksananya pengembangan pariwisata dengan tidak terlibat langsung.	Mengetahui dampak pengembangan pariwisata.
Sebagai Penerima Manfaat	Tidak memberikan kontribusi dalam pengembangan wisata.	Mendukung pengembangan pariwisata.	Hanya menerima manfaat dari pengembangan pariwisata.

Melihat kondisi objek wisata yang tidak lagi beroperasi (fakum) maka Wali Nagari Taram pada tahun 2018 memberikan kesempatan kepada kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna terutama yang berasal dari jorong Tanjung Ateh untuk melakukan pengelolaan objek wisata kapalo banda. Bila dilihat dari keberadaan objek wisata yang terkelola mulai tahun 2018, maka dapat dipandang sebagai pemrakarsa perkembangan objek wisata ini adalah Wali Nagari bersama dengan organisasi pemuda khususnya yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna. Sebagai kelompok masyarakat dengan peran sebagai pemrakarsa bukan pihak pertama yang menemukan kapalo banda sebagai objek wisata, tetapi dapat dikatakan sebagai kelompok yang menggali potensi pariwisata sebagaimana pendapat yang dikemukakan Herdiana D (2019). Lebih lanjut, kelompok pemuda juga memainkan perannya sebagai pengelola objek wisata ini yang diuraikan sebagai berikut.

Peran Masyarakat sebagai Pelaksana/Pengelola

Kelompok pemuda pada Nagari Taram setelah menginisiasi, kelompok pemuda juga memainkan perannya sebagai pelaksanaan pengelolaan objek wisata kapalo banda. Peran yang dilakukan kelompok pemuda diberikan pemerintah nagari dan ninik mamak nagari Taram setelah melakukan musyawarah. Sebagai pengelola kelompok pemuda diberikan kewajiban dan diiringi dengan hak yang akan mereka terima sebagai mana di atur dengan Peraturan Nagari (Pernag) Taram Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Nagari Wisata (Lampiran1).

Pernag ini tidak hanya mengatur tentang objek wisata Kapalo Banda, tapi berlaku untuk semua objek wisata yang ada dalam wilayah Nagari Taram. Sebagaimana seharusnya, kelahiran Pernag No. 7 tahun 2019 setelah melakukan musyawarah dengan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Arahan Pernag dalam hal pengelolaan dapat dilihat pada Pasal 3. Yang lengkapnya sebagai berikut :

- (1) Ruang lingkup pengembangan Nagari wisata meliputi penataan dan pengelolaan kawasan wisata di wilayah Nagari Taram.
- (2) Penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama dan lingkungan hidup serta

dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Nagari Taram dan di sekitar kawasan Nagari wisata.

- (3) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisasi, dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Kelompok yang bergerak di bidang Pariwisata serta dipertanggung jawabkan kepada Wali Nagari.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Kelompok yang bergerak di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari.

Keberadaan Pernag ini memperlihatkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sudah dilakukan secara terencana dan terstruktur dan menjadi bagian dari peran pemerintah nagari Taram untuk mengaturnya.

Elaborasi Pernag No 7 tahun 2019 sebagaimana yang dimasukkan Pernag No7 tahun 2019 pasal 3 (5) diatus baru ditetapkan 4 tahun kemudian yaitu dengan dikeluarkan Surat Keputusan Wali Nagari Taram No. 32 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pengelola, Tarif Tiket, dan Tarif Parkir (Lampiran 2). Dalam periode sebelum adanya Pernag no. 32 tahun 2023, kelompok pemuda sudah melakukan perannya dengan hanya didasarkan kepada kesepakatan dan arahan secara lisan oleh Pemerintahan Nagari dan Lembaga Adat Nagari.

Pada SK Wali Nagari No 32 tahun 2023 diatur kelompok pemuda memiliki masa baktinya mengelola objek wisata kapalo dengan masa bakti 3 tahun dan dalam menjalankan tugas pengelolaannya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Taram. Selain mengatur masa bakti kelompok pemuda pengelola objek wisata Kapala Banda, pada peraturan ini juga diatur tentang apa tugas pengelola sebagaimana yang ditetapkan dalam point ke dua yaitu :

Penjual Tiket mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melayani pengunjung di lokasi tiket.
- b. Memberikan tiket dan menerima uang tiket.
- c. Menyerahkan uang hasil penjualan tiket kepada bendahara setiap hari.

Juru Parkir mempunyai tugas sebagai berikut : -

Mengatur kendaraan.

- d. Menjaga keamanan kendaraan pengunjung.
- e. Memungut uang parkir dan memberikan karcis parkir. -
- f. Menyerahkan Uang parkir kepada Bendahara setiap hari.

Keamanan mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Menjaga keamanan mulai dari lokasi tiket sampai kedaerah lokasi tempat wisata.
- b. Menjaga keselamatan pengunjung pada saat bermain terutama anak-anak dan orang tua.
- c. Menegakkan aturan aturan yang telah disepakati sesuai dengan adat salingka nagari.

Jumlah pemuda yang tergabung dalam kelompok pengelola ada sebanyak Menurut ketua kelompok pemuda yang jumlah nya sebanyak 62 orang termasuk ketua, mereka dalam pengelolaan objek wisata kapalo banda sudah menyusun panduan bekerja. Setiap anggota sudah memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk pengelolaan objek wisata ini. Hal-hal yang diatur dalam panduan tersebut antara lain; jenis pekerjaan yang jadi tanggung jawabnya, waktu kerjanya, jalur koordinasi bekerja dan tindakan darurat apa yang harus dilakukan serta bagaimana melakukannya. (Lampiran 3)

Pada panduan yang dibuat kelompok pemuda pengelola, terlihat keamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi perhatian penting. Kenyamanan antara lain diupayakan dari kebijakan pengelo yang sangat memperhatikan kebersihan objek. Secara rutin semua pengelola melakukan gotong royong untuk

memelihara kebersihan, tidak hanya pada objek wisata tetapi juga di jalan dalam nagari Taram menuju objek wisata.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Taram sepertinya sesuai dengan yang dikemukakan oleh Herdiana D (2019) yang mengatakan Pemerintah desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan tingkat desa tidak hanya harus mampu mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan pengembangan wisata yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi pengembangan desa wisata tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.

Peran Masyarakat Sebagai Pemantau

Peran masyarakat sebagai pemantau yang mana masyarakat bukan pihak yang mengembangkan pariwisata, namun melakukan pengawasan mengenai proses maupun dampak dari adanya pengembangan pariwisata. Pemahaman mengenai pariwisata berbasis komunitas/masyarakat maka dapat dikatakan masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan wisata ditempatkan dalam dua posisi sekaligus; Pertama sebagai objek yang memiliki hak untuk turut menentukan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan. Kedua, sebagai subjek yang harus mendapat manfaat dan keuntungan dalam pengembangan pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman Sunaryo (2013) yang menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yaitu: Pertama, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat. Ketiga, pemberian edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal.

Masyarakat desa harus mampu membuka diri terhadap pihak luar atau wisatawan, serta mampu mengembangkan diri dengan potensi yang dimilikinya, sehingga pengembangan pariwisata dengan masyarakat yang melakukan pemantauan dengan unsur sepenuhnya dapat didorong dengan kapasitas kelembagaan masyarakat yang baik dan pengembangan desa wisata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana peningkatan ekonomi dan kualitas hidup. Proses transisi suatu desa menjadi desa wisata pada prakteknya tidak terjadi secara begitu saja, melainkan didasarkan kepada beberapa alasan yang mendasarinya. Beberapa alasan yang mendorong pengembangan desa wisata, yaitu: Pertama, bagian dari pelestarian nilai tradisi/ budaya. Kedua, bagian dari pengembangan potensi baik itu sumber daya alam, nilai budaya maupun sumber daya manusiawi. Ketiga, kebijakan untuk membuka lapangan pekerjaan. Keempat, mendorong akselerasi pembangunan desa. Kelima, adanya dorongan eksternal, seperti tingginya minat masyarakat untuk melihat keunikan objek wisata yang ada di desa yang bersangkutan. Setelah terjadinya proses pengembangan desa menjadi desa wisata, maka dapat memberikan banyak perubahan kepada desa tersebut.

Masyarakat harus dilibatkan dalam pengembangan desa wisata sejak dari awal, masyarakat dijadikan aktor utama mulai dari tahap identifikasi masalah hingga tahap penyelenggaraan desa wisata. Keterlibatan masyarakat sejak dari awal tersebut didasarkan kepada beberapa hal, yaitu: Pertama, masyarakat merupakan bagian integral dari desa, sehingga berbagai bentuk kebijakan pembangunan yang ada di desa harus diketahui masyarakat sejak dari awal. Kedua, secara kultural, masyarakat memiliki partisipasi yang aktif dalam pembangunan, sehingga adanya pengembangan desa wisata dengan melibatkan masyarakat sejak dari awal akan mendorong percepatan dan keberhasilan penyelenggaraan desa wisata. Ketiga, masyarakat memiliki hak untuk menerima manfaat dari pengembangan desa wisata sejak dari awal proses identifikasi masalah.

Peran Masyarakat Sebagai Penerima Manfaat

Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan

kebudayaan. Proses identifikasi pengembangan desa wisata di Objek Wisata Kaplo Banda merupakan penggalian secara benar mengenai hal-hal yang dianggap mampu dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Dalam proses ini, masyarakat dilibatkan langsung untuk mengenali sendiri potensi yang ada di desanya, hal ini menjadi penting dikarenakan masyarakat merupakan pemilik dari potensi yang ada di desa, sehingga penggalian yang dilakukan oleh masyarakat sendiri akan mampu melahirkan kajian yang utuh mengenai potensi yang sebenarnya ada dan bisa dikembangkan sesuai dengan pemahaman, kebutuhan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Manfaat penggalian potensi oleh masyarakat akan memberikan pengetahuan sejak awal bagi masyarakat mengenai potensi yang dimiliki desa, sehingga masyarakat memiliki gambaran mengenai seperti apa bentuk pengembangan potensi tersebut hingga menjadi daya tarik dalam pengembangan desa wisata.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan desa wisata menjadi penting, hal ini didasarkan kepada alasan sebagai berikut:

pertama, mengakomodasi keinginan dan tuntutan masyarakat, pengembangan desa wisata harus didasarkan atas adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat ditujukan untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan desa dimana keterlibatan masyarakat ditujukan untuk menggugah rasa kepemilikan masyarakat terhadap potensi desa wisata yang dikembangkan sehingga masyarakat memiliki kehendak untuk terlibat dan memiliki rasa memiliki terhadap pengembangan desa wisata. Ketiga, sarana bagi masyarakat untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada, hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama dalam mengembangkan desa wisata akan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan potensi yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya akan menciptakan kelembagaan masyarakat yang kuat.

Penyelenggaraan desa wisata merupakan proses untuk mewujudkan tujuan pengembangan desa wisata, dalam proses ini masyarakat dilibatkan baik sebagai penyelenggara maupun sebagai penerima manfaat. Peran masyarakat sebagai penyelenggara merupakan hak masyarakat untuk mengelola desa wisata, keberlangsungan dan keberlanjutan desa wisata menjadi hak masyarakat, sedangkan peran masyarakat sebagai penerima manfaat ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi penting dikarenakan Peran masyarakat harus menjadi pihak pertama yang diuntungkan dalam pengembangan desa wisata. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan desa wisata menjadi penting untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah bisa dicapai atau belum, masyarakat memiliki hak untuk menilai keberhasilan tersebut dikarenakan dari proses awal masyarakat sudah dilibatkan sehingga dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan desa wisata, masyarakat jauh lebih mengetahui dibanding dengan pihak lainnya. Selain itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat akan meningkatkan kapasitas masyarakat serta menciptakan akuntabilitas dalam keseluruhan proses penyelenggaraan desa wisata. Dari pemahaman tersebut di atas, maka pengembangan desa wisata yang melibatkan masyarakat sejak dari awal sampai dengan akhir merupakan jawaban akan adanya tuntutan untuk menghadirkan masyarakat sebagai pemilik potensi desa wisata yang berhak mengelola dan menerima manfaat dari pengembangan desa wisata, sehingga keberadaan desa wisata mampu menumbuhkan rasa kepemilikan, memperkuat kelembagaan sampai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. KESIMPULAN

1. Bahwasanya peran masyarakat lokal dalam menunjang perkembangan destinasi wisata kapalo banda termasuk dalam kategori baik . Dimana masyarakat berperan sesuai dengan kredibilitas mereka masing-masing , yaitu seperti : a) Sebagai Pemrakarsa , b) Sebagai Pelaksana, c) Sebagai Penyerta, d) Sebagai Pemantau, E) Sebagai Pemegang Manfaat, untuk menunjang perkembangan destinasi wisata yang diperankan langsung oleh Masyarakat lokal. Disamping peran masyarakat lokal itu sendiri di dalam pengembangan destinasi wisata alam kapalo banda ini tidak luput pula dari kontribusi dari seperti Kepala Pemuda, Wali Nagari, Ninik Mamak Serta Pemerintah setempat.
2. Banyaknya manfaat positif yang di dapatkan masyarakat lokal dengan berkembangnya objek wisata kapalo banda ini seperti bertambahnya lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa , menghidupkan budaya, tradisi ataupun lingkungan adat sebagai salah satu komoditas wisata budaya lokal, selain manfaat yang telah disebutkan tadi manfaat berkembang nya wisata lokal ini untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam berkembangnya pariwisata yang bersinergi dengan pemangku kepentingan berhubungan dengan meningkatkan kualitas perkembangan pariwisata daerah.

5. SARAN

Sesuai dengan uraian yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya penulis memberikan asumsi berupa saran bagi pihak masyarakat tetaplah selalu menjaga dan memperhatikan lingkungan agar tetap bersih terjaga kelestariannya sehingga wisatawan akan merasa nyaman , dan semakin banyak yang tertarik untuk berkunjung ke Kawasan Objek Wisata Kapalo Banda agar dapat menjadi lebih maju lagi dan lebih terkendali untuk membantu masyarakat memberikan lapangan pekerjaan bagi msyarakat yang membutuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga, agar menerima manfaat yang lebih dari pengelolaan desa wisata ini maka di harapkan agar masyarakat lokal selalu memberikan upaya yang terbaik untuk meningkatkan kapasitas, peran dan inisiatif dalam membangun kepariwisataan , meningkatkan keterampilan, kualitas keterlibatan / partisipasi masyarakat dan juga menerima Pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal . Sehingga meningkatkan kepastian bagi masyarakat lokal dalam menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dogra, Ravinder and Gupta, Anil, 2012, Barriers to Community Participation in Tourism Development: Empirical Evidence from a Rural Destination, *South Asian Journal of Tourism and Heritage*.
- [2] Dimiyanti, A. 2003. *Usaha Pariwisata*, Jakarta. 10 H. Woodward Frank, *Manajemen Transportasi (ancangan mengefektifkan transportasi dalam dunia bisnis)*. Seri Manajemen no. 70, PPM, Jakarta: CV. Indah Grafika, 1972. Hal.102 11 Ibid
- [3] Tosun, Cevat and Timothy, Dallen J., 2003, Arguments for Community Participation in the Tourism Development Process, *The Journal Of Tourism Studies*, 14: 1-15.
- [4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- [5] Saputra, T., Nurpeni, N., Astuti, W., Harsini, H., Nasution, S. R., Eka, E., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246-251.

- [6] Zou, T., Huang, S., and Ding, P., 2014, Toward A Communitydriven Development Model of Rural Tourism: The Chinese Experience, *International Journal of Tourism Research*, 16: 261-271